

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan selama 5 minggu baik secara offline maupun online adalah sebagai berikut:

1. Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang melakukan praktek kefarmasian dan memiliki peran penting dalam pencapaian kesehatan masyarakat yang lebih baik.
2. Melalui PKPA, mahasiswa calon Apoteker dapat memperoleh kesempatan langsung untuk merasakan, melihat dan mempelajari strategi dalam dunia kerja. Mahasiswa calon Apoteker memperoleh pengalaman langsung dalam hal pelayanan kefarmasian baik dalam pelayanan resep maupun pelayanan non resep.
3. Calon Apoteker harus memiliki kemampuan manajerial yang baik mulai dari pengelolaan sediaan farmasi seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengendalian, pemusnahan, penlaporan sampai dengan manajemen SDM.
4. Dalam pelayanan farmasi klinis calon Apoteker harus mampu berperan aktif dalam pelayanan kepada pasien baik terkait analisis resep, komunikasi dua arah, pemberian informasi terkait cara penggunaan, PIO dan edukasi (KIE) serta pemberian pelayanan obat non-resep.

5. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker memberikan pengetahuan, pengalaman, serta ketrampilan praktis yang sangat berguna bagi calon Apoteker.

5.2 Saran

Saran yang akan diperoleh berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan selama 5 minggu baik secara offline maupun online adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa PKPA perlu meningkatkan pengetahuan kefarmasian, kepercayaan diri dan pembelajaran komunikasi efektif yang diperlukan dalam kegiatan PKPA.
2. Pemberian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien mengerti bagaimana cara penggunaan obat yang benar dan dapat menambah kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat sehingga obat tersebut mampu memberikan efek terapi yang diharapkan.
3. Calon apoteker diharapkan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek dan melakukannya dengan benar, sehingga terhindar dari kesalahan yang dapat terjadi.
4. Peningkatan kegiatan farmasi klinis seperti konseling, pendokumentasian *Patient Medication Record*, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan *Home Pharmacy Care* sekurang kurangnya 1 bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anief, M. 2008, Manajemen Farmasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Baxter, K. 2008, Stockley's Drug Interaction: A Source Book of Adverse Interaction. England : Black Science.
- Brandt, KD., Doherty, M., Lohmander, LS. 2003, Osteoarthritis. 2nd ed. Oxford University Press. New York hal: 299-308.
- British National Formulary* 80 ed, 2020, BNF.ORG, London.
- British National Formulary For Children*, 2020, BNF.ORG, London.
- British Medical Association, 2017, British National Formulary 73th ed., Royal Pharmaceutical Society, London.
- Champe, C., Harvey, A, Ferrier, R, 2013, Biochemistry 4th Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore.
- Dipiro J T, Barbara G W, Terry L S, Cecily V, 2009, Pharmacotherapy Hand Book 7th ed, United State: Mc Graw-Hill.
- Drug Bank, 2021, Canadian Institutes of Health Research, <https://drugbank.ca/> [online], Diakses pada Februari 2021.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.2411 tentang Ketentuan Pokok Pengelompokan dan Penandaan Obat Bahan Alam Indonesia.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 1332 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/86 tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G.

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MENKES/ SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2380/A/SK/VI/83 tentang Tanda Khusus untuk Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas.
- Keputusan Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., Lance, L.L., 2009. Drug Information Handbook: A Comprehensive Resource for all Clinicians and Healthcare Professionals, 17th ed. Lexi- Comp Inc, Ohio.
- Mashuda, A., 2011, *Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang Baik*, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta.
- MIMS, 2021, *MIMS Indonesia*, <https://www.mims.com/> [online], Diakses pada Februari 2021.
- Medscape, 2021, *Medscape Drug Interaction Checker*, <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker> [online], Diakses pada Februari 2021.
- McEvoy., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika,
- Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.41.1384 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diberikan tanpa Resep
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 889 Tahun 2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 Tentang Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922 tahun 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin

Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.

Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

Sweetman, S. C. 2009. Martindale The Complete Drug Reference. Thirty Sixth Edition. Pharmaceutical Press. New York.

Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L. 2012, Manajemen Farmasi Edisi 3, Airlangga University Press, Surabaya.

Seto, S., Nita, Y., dan Triana, L., 2015, Manajemen Farmasi “Lingkup: Apotek, Farmasi Rumah Sakit, Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi”, Edisi 2, Universitas Airlangga, Surabaya.

Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor PO.005/PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang
Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan.